

Judul : Kekerasan oleh aparat dikecam keras
Tanggal : Sabtu, 09 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Kekerasan oleh Aparat Dikecam Keras

Baik pemerintah maupun DPR diminta membentuk tim independen untuk mengusut kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat di Pulau Rempang.

RIFALDI PUTRA IRIANTO
rifaldi@mediaindonesia.com

AMNESTY International Indonesia mengancam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Kamis (7/9), lantaran masyarakat adat setempat menolak proyek strategis nasional kawasan Rempang Eco City.

"Kami mengancam kekerasan aparat kepolisian terhadap warga masyarakat Pulau Rempang-Galang, Kepulauan Riau. Ironisnya, ini bukan kekerasan yang pertama terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional yang dipaksakan sehingga mengancam hidup warga masyarakat," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, kemarin.

"Ini menandakan proyek strategis nasional kembali bermasalah, jangan paksa masyarakat," imhuhnya.

Usman menyoroti cara yang digunakan aparat dalam menghadapi penolakan masyarakat adat. Alih alih menggunakan cara persuasif, personel Polri justru menggunakan cara represif dengan menembakkan gas air mata. Bahkan, gas air mata memasuki area sekolah di Pulau Rempang.

"Tindakan eksekutif ini jelas merendahkan harkat dan martabat manusia yang diakui hukum internasional dan hukum nasional. Tindakan ini melanggar hak warga untuk menyampaikan pendapat dengan damai, hak mereka untuk hidup tanpa takut, dan hak atas kesejahteraan sosial mereka," tegas Usman.

Tidak hanya menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan massa yang ikut protes damai, sambung Usman, kepolisian menangkap enam warga dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat pukulan. Selain itu, ratusan murid sekolah yang sedang mengikuti kegiatan belajar harus

dibubarkan imbas gas air mata yang masuk ke area SMP Negeri 22 Galang dan SD Negeri 24 Galang.

Usman mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghentikan penggunaan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang. Dia juga meminta Polri membicarakan masyarakat adat yang ditangkap.

Kekerasan di Pulau Rempang itu mengulangi pola yang sama dalam beberapa konflik agraria, seperti yang terjadi di Padang dan Bandung, Agustus lalu. Saat itu, aparat kepolisian secara tidak proporsional melakukan penangkapan dan menggunakan kekerasan fisik, termasuk memakai pentungan dan gas air mata, terhadap warga sipil yang memperjuangkan hak-hak mereka secara damai.

Belum paham aturan

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyebut masih banyak jajaran kepolisian yang belum memahami aturan sehingga terjadi kekerasan terhadap warga sipil seperti di Pulau Rempang. Dia mengingatkan aturan itu seperti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Lalu, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-hara.

Bambang menegaskan kekerasan oleh aparat negara kepada masyarakat harus dihentikan. Dia juga meminta pemerintah dan DPR membentuk tim independen untuk mengusut kasus Pulau Rempang.

Di lain sisi, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan tidak perlu ada evaluasi dalam insiden di Pulau Rempang. Dia juga menepis kabar adanya korban jiwa dalam peristiwa itu.

Menurut Ramadhan, aparat hanya melakukan pengamanan RP Batam saat mengukir dan mematok lahan. Keributan dipicu adanya ketidakpahaman warga terkait dengan tugas pengamanan oleh aparat.

Ramadhan pun beralasan gas air mata mengenai warga karena tertiuap angin. "Ini adalah kegiatan pengamanan, imbas gas air mata yang tujuannya adalah membubarkan warga," jelasnya. (Ndf/Yon/X 4)